

## PETA PROSES BISNIS (AS-IS)

### PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2026

| Nomor Dokumen      | :                                                                | 000/.../Peta-Probis/Setda/2026                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Indikator Pemdi    | :                                                                | I15 — Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor (Level 1 — Initiate) |
| Dasar utama        | :                                                                | Perbup Aceh Tengah No. 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE       |
| Jenis peta         | Peta proses bisnis kondisi saat ini (as-is)                      |                                                                    |
| Metode pemodelan   | BPMN (Business Process Model and Notation) dan flowchart         |                                                                    |
| Unit pengampu      | Bagian Organisasi Setda bersama Dinas Komunikasi dan Informatika |                                                                    |
| Periode penyusunan | Semester I Tahun 2026                                            |                                                                    |

#### I. Pendahuluan

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah dokumen yang memetakan seluruh proses kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik proses manajemen pemerintahan, proses utama (core process) pelayanan, maupun proses pendukung (supporting process). Penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu prasyarat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyusun peta proses bisnis kondisi saat ini (as-is) yang selanjutnya

menjadi dasar pemetaan proses bisnis target (to-be), identifikasi integrasi lintas sektor, dan penyederhanaan proses (business process reengineering). Dokumen ini merupakan bukti dukung awal (Level 1 — Initiate) Indikator 15 Pemerintah Digital.

## II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE.

## III. Maksud dan Tujuan

Maksud:

- memetakan seluruh proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah dalam kondisi saat ini (as-is);
- menyediakan acuan awal untuk perancangan proses bisnis target (to-be) yang terpadu;
- memenuhi bukti dukung I15 Level 1 Pemerintah Digital.

Tujuan:

- tersedianya katalog proses bisnis pemerintahan daerah yang terstruktur;
- teridentifikasinya keterkaitan proses antar Perangkat Daerah;
- terpetakannya proses yang sudah/belum didukung SPBE;
- memudahkan perancangan integrasi dan penyederhanaan proses.

## IV. Kerangka Klasifikasi Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar mengacu pada PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2018:

| Kelompok                           | Dampak                                                     | Contoh                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proses Manajemen Pemerintahan (MP) | Mengelola arah, perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas | Perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi, |

|                                    |                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                    | pengawasan                                                                                         |
| Proses Inti/Utama (PI — Core)      | Langsung menghasilkan layanan kepada masyarakat/menjalankan urusan | Layanan administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal, dll. |
| Proses Pendukung (PP — Supporting) | Mendukung kelancaran proses inti dan manajemen                     | Persuratan, kearsipan, pengadaan, aset, teknologi informasi, humas, umum                           |

## V. Peta Proses Bisnis Level 0 (Peta Induk)

Peta Level 0 menggambarkan hubungan ketiga kelompok proses secara keseluruhan: Proses Manajemen Pemerintahan mengarahkan, Proses Inti menghasilkan layanan, Proses Pendukung menyediakan sumber daya.

### [ DIAGRAM BPMN ]

#### Gambar 1. Peta Proses Bisnis Level 0 Kabupaten Aceh Tengah

[ BPMN / FLOWCHART ]

*Diagram: Input (aspirasi/regulasi) → Proses Manajemen (perencanaan, penganggaran) → Proses Inti (25 urusan/layanan) → Output (layanan publik) didukung Proses Pendukung (SDM, TI, aset, keuangan).*

## VI. Daftar Proses Bisnis As-is per Kelompok

### A. Proses Manajemen Pemerintahan (MP)

| No | Kode  | Nama Proses                                            | Penanggung Jawab | Aplikasi Pendukung |
|----|-------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1  | MP-01 | Penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) | Bappeda          | SIPD               |
| 2  | MP-02 | Penyusunan anggaran (KUA-PPAS, APBD)                   | BPKAD/Bappeda    | SIPD, SIPD-Kuangan |
| 3  | MP-03 | Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan                 | BPKAD            | SIPD, SIPD-Kuangan |
| 4  | MP-04 | Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan              | BPKAD            | SIPD               |
| 5  | MP-05 | Perencanaan dan                                        | BKPSDM           | SIPD, e-Kinerja    |

|    |       |                                              |                   |                    |
|----|-------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|    |       | pengembangan SDM ASN                         |                   |                    |
| 6  | MP-06 | Pengadaan barang/jasa pemerintah             | Bagian PBJ        | SPSE/LPSE          |
| 7  | MP-07 | Penyusunan produk hukum daerah               | Bagian Hukum      | JDIH, e-Office     |
| 8  | MP-08 | Pengawasan internal dan tindak lanjut temuan | Inspektorat       | -                  |
| 9  | MP-09 | Pelaksanaan reformasi birokrasi & SAKIP      | Bagian Organisasi | e-SAKIP, e-Kinerja |
| 10 | MP-10 | Pengelolaan organisasi dan tata laksana      | Bagian Organisasi | -                  |

## **B. Proses Inti (PI) — Urusan Wajib dan Pilihan**

| No | Kode  | Nama Proses/Layanan                       | Penanggung Jawab | Aplikasi Pendukung      |
|----|-------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | PI-01 | Penerbitan KTP-el, KK, akta catatan sipil | Disdukcapil      | SIAK, e-Office          |
| 2  | PI-02 | Perizinan berusaha & non-berusaha         | DPMPTSP          | OSS, SiCantik, e-Office |
| 3  | PI-03 | Layanan administrasi sekolah dan PPDB     | Dinas Pendidikan | PPDB Online             |
| 4  | PI-04 | Layanan kesehatan dasar dan rujukan       | Dinkes/RSUD      | SIMRS, P-Care           |
| 5  | PI-05 | Bantuan sosial dan penanganan PMKS        | Dinsos P3A       | SIKS, e-Office          |
| 6  | PI-06 | Penerbitan izin praktik tenaga kesehatan  | Dinkes           | -                       |
| 7  | PI-07 | Pelatihan dan penempatan tenaga kerja     | Disnakertrans    | -                       |
| 8  | PI-08 | Penerbitan NIB dan izin UMKM              | DKUKMP           | OSS, e-Office           |
| 9  | PI-09 | Penerbitan IMB/PBG dan SLF                | Dinas PUPR       | SIMBG                   |
| 10 | PI-10 | Pelayanan persampahan dan lingkungan      | DLH              | SIPSN                   |
| 11 | PI-11 | Penerbitan Surat Izin Praktik (Nakes)     | Dinkes           | -                       |
| 12 | PI-12 | Pelayanan administrasi kependudukan       | Camat            | e-Office                |

|    |       |                                           |                        |                        |
|----|-------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    |       | kecamatan                                 |                        |                        |
| 13 | PI-13 | Layanan kependudukan tingkat gampong      | Keuchik                | -                      |
| 14 | PI-14 | Penanganan bencana dan kedaruratan        | BPBD                   | -                      |
| 15 | PI-15 | Penyediaan data dan informasi pembangunan | Bappeda/<br>Diskominfo | OpenData,<br>Bapokting |

### C. Proses Pendukung (PP)

| No | Kode  | Nama Proses                                | Penanggung Jawab       | Aplikasi Pendukung   |
|----|-------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | PP-01 | Persuratan dan kearsipan dinas elektronik  | Bagian Umum/Diskominfo | e-Office, TTE        |
| 2  | PP-02 | Pengelolaan kepegawaian dan kinerja ASN    | BKPSDM                 | e-Absensi, e-Kinerja |
| 3  | PP-03 | Pengelolaan aset daerah                    | BPKAD                  | SIMDA Aset           |
| 4  | PP-04 | Pengelolaan TI, jaringan, dan SPBE         | Diskominfo             | SIAP Digital, PDN    |
| 5  | PP-05 | Kehumasan dan keprotokolan                 | Bagian Prokopim        | Website, medsos      |
| 6  | PP-06 | Layanan pengadaan dan pengelolaan logistik | Bagian PBJ             | SPSE/LPSE            |
| 7  | PP-07 | Layanan hukum dan advokasi                 | Bagian Hukum           | JDIH                 |
| 8  | PP-08 | Layanan administrasi umum dan rumah tangga | Bagian Umum            | e-Office             |

## VII. Contoh Detail Proses Bisnis (BPMN Level 2)

### VII.1 Contoh Proses Inti – Penerbitan KTP-el

Proses penerbitan KTP-el saat ini (as-is) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke Disdukcapil/UPTD dengan membawa KK dan dokumen pendukung;
2. Petugas loket memverifikasi berkas dan merekam data pemohon pada SIAK;
3. Pemohon dilakukan perekaman biometrik (sidik jari, iris, foto);
4. Data dikirim ke pusat (Dukcapil) untuk pencetakan;
5. KTP dicetak dan diserahkan kepada pemohon;
6. Pengarsipan berkas dan pemutakhiran data.

**[ DIAGRAM BPMN ]**

## **Gambar 2. BPMN Proses Penerbitan KTP-el (As-is)**

*[ BPMN / FLOWCHART ]*

*BPMN: Start → Ajukan → Verifikasi → Rekam Biometrik → Kirim ke Pusat → Cetak → Serahkan → End  
(dengan swimlane Pemohon, Petugas, Sistem Pusat).*

### **VII.2 Contoh Proses Inti — Perizinan (PBG/IMB)**

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket/portal;
2. Petugas front-office memeriksa kelengkapan;
3. Tim teknis OPD melakukan verifikasi lapangan/rekomendasi;
4. Perhitungan retribusi dan penerbitan SK;
5. Penandatanganan (TTE) dan penyerahan dokumen;
6. Pengarsipan dan pelaporan.

**[ DIAGRAM BPMN ]**

## **Gambar 3. BPMN Proses Penerbitan PBG (As-is)**

*[ BPMN / FLOWCHART ]*

*BPMN: Start → Permohonan → Verifikasi → Cek Lapangan → Rekomendasi → Perhitungan Retribusi → SK → TTE → End.*

### **VII.3 Contoh Proses Pendukung — Persuratan Dinas (e-Office)**

1. Pimpinan/staf membuat konsep naskah dinas;

2. Verifikasi atasan langsung;
3. Persetujuan dan TTE oleh pejabat berwenang;
4. Pemberian nomor dan pemberkahan;
5. Pendistribusian melalui e-office;
6. Pengarsipan otomatis.

### [ DIAGRAM BPMN ]

**Gambar 4. BPMN Persuratan Dinas Elektronik (As-is)**

*[ BPMN / FLOWCHART ]*

*BPMN: Start → Konsep → Verifikasi → Persetujuan → TTE → Nomor & Berkas → Distribusi → Arsip  
End.*

## VIII. Matriks Keterkaitan Proses Lintas Perangkat Daerah

Keterkaitan antarproses lintas sektor diidentifikasi sebagai berikut (tahap awal):

| Proses                | PD Terkait                             | Pertukaran Data/Informasi     | Sudah Digital? |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Penerbitan KTP-el     | Disdukcapil, Dinkes, Dinsos, Camat     | Data kependudukan (NIK, KK)   | Sebagian       |
| Perizinan berusaha    | DPMPTSP, PUPR, DKUKMP, DLH, Kesbangpol | Data izin, rekomendasi teknis | Sebagian       |
| Layanan pendidikan    | Dindik, Dukcapil, BKPSDM               | Data siswa/NIK, NUPTK         | Sebagian       |
| Layanan kesehatan     | Dinkes/RSUD, Dukcapil, BPJS            | NIK, rekam medis, jaminan     | Sebagian       |
| Bantuan sosial        | Dinsos, Dukcapil, Bappeda              | Data DTKS, NIK                | Sebagian       |
| Penanganan bencana    | BPBD, DLH, PUPR, TNI/Polri             | Data kejadian, lokasi, korban | Sebagian       |
| Pengadaan barang/jasa | Seluruh PD, Bagian PBJ                 | Data aset, RUP, kontrak       | Sebagian       |

## IX. Identifikasi Awal Kesenjangan dan Potensi Penyederhanaan

- Sebagian proses masih dilaksanakan secara manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi;

- Pertukaran data antar Perangkat Daerah belum terintegrasi penuh (mis. data kependudukan sebagai data induk);
- Masih ada duplikasi pengumpulan data antara satu PD dengan PD lain;
- Beberapa proses belum memiliki SOP/baku mutu yang jelas;
- Tanda tangan elektronik (TTE) sudah tersedia namun belum digunakan seluruh pejabat;
- Belum ada pemetaan proses bisnis target (to-be) yang selaras dengan RAN Pemdi.

## X. Rencana Tindak Lanjut

| No | Rencana                                             | Output               | Waktu        |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Finalisasi peta as-is per PD dan verifikasi         | Peta as-is final     | 2026         |
| 2  | Penyusunan peta proses bisnis to-be                 | Peta to-be           | 2026—2027    |
| 3  | Analisis penyederhanaan dan integrasi proses        | Matriks simplifikasi | 2027         |
| 4  | Pengintegrasian data dan aplikasi layanan prioritas | Layanan terintegrasi | 2027—2028    |
| 5  | Pemutakhiran peta proses secara berkala             | Dokumen mutakhir     | Setiap tahun |

## XI. Penutup

Demikian dokumen Peta Proses Bisnis (As-is) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini disusun sebagai bahan awal untuk mewujudkan keterpaduan proses bisnis lintas sektor. Dokumen ini akan disempurnakan melalui verifikasi tiap Perangkat Daerah, pembahasan Tim Koordinasi Pemdi, dan selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan.

Takengon, ..... 2026

Kepala Bagian Organisasi Setda,

(.....)

NIP. ....

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

(.....)

NIP. ....